

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)* UU No. 17 Tahun 1985. LN Nomor 76 Tahun 1985. TLN Nomor 3319.
- _____. *Undang-Undang tentang Wilayah Negara*. UU Nomor 43 Tahun 2008. LN Nomor 177 Tahun 2008. TLN Nomor 4925.
- _____. *Undang-Undang tentang Perairan Indonesia*. UU Nomor 6 Tahun 1996. LN Nomor 73 Tahun 1996. TLN Nomor 3647.

B. Buku

- Anwar, Chairul. *Hukum Internasional: Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*. Jakarta: Djambatan, 1989.
- Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, *Perjanjian Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea mengenai Pengaturan-Pengaturan Perbatasan*. Jakarta, 2014.
- Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua. *Profil Potensi Perbatasan Negara RI di Provinsi Papua*. Jakarta, 2009.
- Buana, Mirza Satria. *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Buntoro, Kresno. *Nusantara & ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Darmadi, Hamid. *Profil Investasi Kabupaten Merauke*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Dengah, Ivon. *Uncen Usulkan Penelitian Hak Ulayat Tanah*. Jayapura: Fisip Universitas Cendrawasih, 2009.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2016.
- Hartono, Dimiyati. *Hukum Laut Internasional: Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai Negara Nusantara*. Jakarta: BPHN, Binacipta, 1983.
- Howay, Julian. *Sosialisme untuk Pembebasan Papua?*. Jakarta: Indoprogress, 2016.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah, terjemahan Ahmadie Toha*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Binacipta, 1982.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumni, 2003.
- Mansoben, J.R.. *Menakar Sejahtera Di Batas Republik Indonesia*. Jayapura: Universitas Cendrawasih, 2012.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2015.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Parthiana, I Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Perkasa, Vidhyandika. *Tata Kelola yang Baik dan Akuntabilitas Sosial di Papua*. Jakarta: CSIS, 2011.
- Rahab, Amiruddin. *Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2010.
- Sarosa, Wicaksono. *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2011.
- Siregar, Latifah Anum. *Menuju Papua Tanah Damai: Perspektif Non Papua*. Jayapura: AIDP, 2013.

- Situmorang, Victor. *Sketsa Asas Hukum Laut*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Starke, J.G.. *Pengantar Hukum Internasional, Dialih Bahasa oleh Bambang Iriana Djajaatmadja*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sumardiman, Adi. *Seri Hukum Internasional: Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Tarmansyah, Umar S.. *Potensi dan Nilai Strategis Wilayah Perbatasan Negara: Permasalahan dan Solusinya*. Jakarta: Puslitbang Industri Pertahanan, Balitbang Dephan, 2016.
- Tewu, M.L. Denny. *Membangun Papua Dengan Hati & Kasih*. Jakarta: Verbum Publishing, 2011.
- Wuryandari, Ganewati. *Pengelolaan Keamanan Perbatasan: Kajian Teoritis*. Jakarta: P2P LIPI & Pustaka Pelajar, 2014.

C. Lain-lain

- Anari, John. (2008). Organisasi Masyarakat Adat Papua Barat (WPIO). *Diktat Indigenous Peoples*, 3(12): 23.
- Elisabeth, Adriana. (2006). Dimensi Internasional Kasus Papua. *Jurnal Penelitian Politik*, 3: 1.
- Haryadi. (2008). Perspektif Implementasi Kebijakan. *Jurnal Pengaturan Perbatasan RI-PNG*, 13(4): 574.
- Humpherey, Wangke. (2008). Perspektif Keamanan Ekonomi, Kajian. *Jurnal Pengelolaan Perbatasan RI-PNG*, 13(3): 1.
- John Bernando Seran. "Perbatasan Wilayah Menurut Hukum Internasional". Diakses dari <http://kupang.tribunnews.com/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-internati-onal>, tanggal 27 Maret 2019.
- Juna Dinasthi. "Pengertian Negara, Unsur, Sifat, Fungsi, dan Tujuan". Diakses dari <http://sistempemerintahanindonesia.blogspot.com/2013/09/pengertian-negara-unsur-fungsi-tujuan.html>, tanggal 28 Maret 2019.

- Juni, Fuad *Wawancara*, Staf Dinas Hukum Angkatan Laut, Markas Besar TNI Angkatan Laut, Jakarta Timur, 8 Oktober 2019.
- Lahnisafitra, Irwan. (2005). *Kajian Pengembangan Wilayah Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Serawak*. Tesis Master – S2 Pada Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung, 3.
- Letjen TNI Moeldoko. *Kompleksitas Perbatasan Tujuan Dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan RI Tahun 2011*. Diakses melalui http://idu.ac.id/index.php?option=com_dotman&task=cat_view&gid=166&Itemid=30, tanggal 26 Maret 2019.
- Manurung, Frinsiska. *Upaya BNPP Dalam Menangani Masalah Keamanan di Perbatasan Indonesia*. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, Vol. 5 Edisi II. Universitas Riau.
- Murtado, Ali *Wawancara*. Pejabat Fungsional Diplomat, Direktorat Jenderal Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 5 September 2019.
- Reinhold, Yohanes. (2008). *Kajian Faktor Pendorong Pengembangan Kawasan Perbatasan Jayapura, Indonesia - Vanimo, PNG*. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 4: 99.
- Slama, Martin dan Jenny Munro. (2015). *Dari 'Zaman Batu' ke 'Waktu Nyata' Menjelajahi Temporalitas, Mobilitas, dan Religiositas Papua*. Canberra: Australian National University Press. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1): 22.
- Wikipedia. “Pengertian Keamanan Nasional”. tersedia di https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan_nasional. Diakses tanggal 28 Maret 2019.
- Wikipedia. “Pengertian Negara Indonesia”. tersedia di <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>. Diakses tanggal 28 Maret 2019.
- Wikipedia. “Pengertian Papua”. tersedia di <https://id.wikipedia.org/wiki/Papua>. Diakses tanggal 28 Maret 2019.